

SKRIPSI

PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT YANG DILAKUKAN OLEH P.T. GARUDA INDONESIA

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA



Oleh :

WAHYU MURDIANINGSIH

NIM : 030015017

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA**

2004

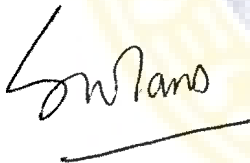
**PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT
YANG DILAKUKAN OLEH P.T. GARUDA INDONESIA**

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

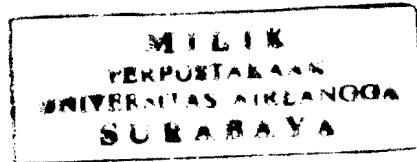


Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.
NIP. 132133957



Wahyu Murdianingsih
NIM. 030015017

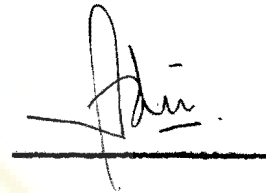
**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2004**



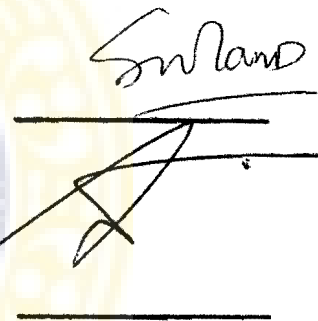
**Skripsi ini telah diuji dihadapan Panitia Penguji
Pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2004**

Tim Penguji :

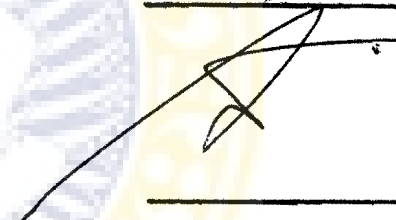
1. Ketua : L. Budi Kagramanto, S.H., M.H., MM.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "L. Budi Kagramanto", written over a horizontal line.

2. Anggota : Sinar Ayu Wulandari, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sinar Ayu Wulandari", written over a horizontal line.

Hj. Mas Rahmah, S.H., M.H.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Hj. Mas Rahmah", written over a horizontal line.

BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis uraikan, adalah :

- a. KPPU dalam menangani perkara atas adanya dugaan telah terjadi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh P.T. Garuda Indonesia harus melalui beberapa tahap, yaitu :
 - i. Penyampaian Laporan;
 - ii. Pemeriksaan Pendahuluan;
 - iii. Pemeriksaan Lanjutan;
 - iv. Pengambilan putusan oleh KPPU bahwa P.T. Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 14 Undang-Undang Persaingan tentang integrasi vertikal; P.T. Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Persaingan tentang perjanjian tertutup; P.T. Garuda Indonesia tidak terbukti melanggar pasal 17 Undang-Undang Persaingan tentang Monopoli; P.T. Garuda Indonesia tidak terbukti melanggar pasal 19 huruf (a), (b), (d) Undang-Undang Persaingan tentang penguasaan pasar; P.T. Garuda Indonesia terbukti melanggar pasal 26 huruf (b) Undang-Undang Persaingan tentang jabatan rangkap.

- b. Upaya hukum yang dapat dilakukan bagi pihak yang tidak puas atas putusan yang telah dikeluarkan oleh KPPU dengan jalan mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri tempat kedudukan hukum pelaku usaha terlapor (P.T.Garuda Indonesia). Pengaturan tentang prosedur pengajuan suatu keberatan diatur dalam PERMA RI No.1 Th. 2003. Apabila salah satu pihak merasa tidak puas atas putusan Pengadilan Negeri tersebut, maka mereka dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

2. Saran

Beberapa saran dari penulis untuk peningkatan kinerja bagi KPPU agar dalam penanganan perkara selanjutnya akan lebih baik, adalah :

- a. Merevisi dan memperjelas isi dari tiap-tiap pasal dari Undang-Undang Persaingan agar tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda karena pasal-pasal tersebut menjadi dasar adanya laporan dari masyarakat atau KPPU terhadap adanya indikasi praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan sosialisasi kepada pelaku usaha agar tidak melakukan segala macam bentuk praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat sebagai konsumen, dan hakim-hakim yang memiliki kewenangan dalam memutuskan suatu perkara persaingan agar membuat putusan yang dapat diterima oleh semua pihak.

- c. Memberi kemudahan bagi pelaku usaha khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan persaingan usaha di negara kita ataupun untuk keperluan penelitian, serta selalu memperbarui informasi yang ada dalam situs KPPU.

